BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari paparan pembahasan dan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai peranan *World Food Programme* (WFP) melalui program *Food For Assets* (FFA) dalam upaya mengurangi potensi rawan pangan di Nusa Tenggara Barat, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Provinsi Nusa Tenggara Barat diidentifikasi sebagai salah satu yang paling rawan di Indonesia dalam hal kesiapan dan kapasitas untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Dampak dari perubahan iklim secara signifikan meningkatkan ancaman terhadap wilayah semakin berpotensi mengalami rawan pangan sementara kearah rawan pangan yang kronis, khususnya masyarakat lokal yang masih menggantungkan atau bergantung pada sistem pertanian tradisional. Kerawanan pangan dapat terjadi bukan hanya karena kondisi ketidakmampuan wilayah ataupun ketidakmampuan rumah tangga untuk menyediakan pangan sesuai kebutuhannya, tetapi kerawanan pangan juga dapat terjadi karena adanya kondisi-kondisi *transient* seperti terjadinya bencana alam yang akibatnya, banyaknya daerah puso, deforestasi hutan. Hal ini merupakan tantangan serius bagi *World Food Programme* dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya mengurangi potensi rawan pangan di Nusa Tenggara Barat.

2. Upaya yang telah dilakukan *World Food Programme* adalah mengembangkan cara-cara tambahan untuk mengurangi potensi rawan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan sambil beradaptasi terhadap perubahan iklim. Berbagai intervensi *World Food Programme* di tingkat lapangan sudah mendukung masyarakat untuk mengatasi periode kerawanan pangan dan membantu membangun ketahanan pangan di tingkat masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Melalui program *Food For Assets* (FFA), *World Food Programme* bekerja sama dengan pemerintah Nusa Tenggara Barat membantu masyarakat dan rumah tangga yang paling rentan mengalami kerawanan pangan sementara atau transient yang berpotensi mengalami kerawanan pangan kronis, dengan kesempatan bekerja untuk menghasilkan aset infrastruktur pertanian dan pedesaan skala kecil yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Selain adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh *World Food Programme* melalui program *Food For Assets* di Nusa Tenggara Barat, ada pula beberapa kendala yang dihadapi oleh *World Food Programme* adalah persoalan kesulitan dalam persoalan akses jalan ke wilayah yang mengalami rawan pangan. Ada beberapa hal yang harus dipastikan bahwa pelaksanaan *Food For Assets* (*food for work*) atau padat karya pangan harus menghindari kegiatan padat karya yang mengganggu ekosistem alam dan sosial, yang menimbulkan bahaya bagi lingkungan dan masyarakat, mengganggu tempat beribadat, juga wilayah yang sulit untuk dipantau. Rawannya terjadi konflik diantara masyarakat setempat yang mendapatkan bantuan, hal ini

dikarenakan oleh persoalan lahan pertanian. Pemerintah yang terfragmentasi (terpecah belah) dan kurangnya kapasitas. Sulitnya mendapatkan penterjemah bahasa untuk kebutuhan masyarakat di pedesaan. Kualitas atau keberlanjutan program *Food For Assets*, adanya kekhawatiran terutama mengingat lingkungan yang rawan, kondisi yang kompleks, risiko yang bisa saja merugikan masyarakat. Monitoring dan evaluasi jangka panjang, keberlanjutan asset, pendanaan lanjutan, dan masalah logistik di sekolah yang mendapatkan bantuan makanan sekolah dari hasil pangan lokal melalui program *Food For Assets*, bahwa tidak memiliki gudang penyimpanan, hal ini menyebabkan makanan disimpan di ruang kepala sekolah.

4. Program *Food For Assets* di NTB melalui proses konsultasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat, pemerintah, LSM. Kegiatan FFA yang telah dituntaskan pada tahun 2010 meliputi konservasi kawasan pesisir dengan penanaman bakau, terasering lahan, penghijauan (Rumah Kebun dan *Agroforestry*), dan pembangunan bendungan (DAM). Hasilnya adalah 1.056 hektar wilayah pesisir telah terehabilitasi dengan ditanami lebih dari 2,8 juta pohon bakau (mangrove), 578 hektar lahan pertanian telah mendapatkan manfaat dari pembuatan irigasi baru, dan 11 hektar kawasan *silvofishery* telah dikembangkan. Masyarakat juga mendapatkan pelatihan mengenai perubahan iklim dan aktivitas yang menghasilkan penghasilan tambahan. lebih dari 73.000 orang di kabupaten di Nusa Tenggara Barat menerima bantuan. Selain itu, lebih dari 650 petani dan nelayan mendapat pelatihan untuk membantu mereka lebih menjaga hampir 1.250 hektar lahan pesisir

dan lahan kritis lainnya. Selain berupaya untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana, dan mengurangi potensi rawan pangan, program *Food For Assets* juga memberikan insentif bantuan pangan jangka pendek untuk 11.000 rumah tangga miskin, dan mendukung kesempatan mendapatkan tambahan pendapatan.

5. *World Food Programme* (WFP) sebagai Organisasi Internasional yang menangani bantuan pangan telah melakukan peranannya dalam upaya mengurangi potensi rawan pangan di Nusa Tenggara Barat melalui programnya *Food For Assets* (FFA). Upaya yang dilakukan *World Food Programme* sesuai dengan tujuan dan fungi utama *World Food Programme* yaitu membantu membangun aset dan memperbaiki taraf hidup masyarakat miskin yang mengalami kerawanan pangan khususnya melalui program-programnya, salah satunya ialah program *Food For Assets*. Dalam tiga kategori Peranan Organisasi Internasional, maka *World Food Programme* sebagai Organisasi Internasional (*Intergovernmental Organizations*-IGO) dapat dikatakan sebagai instrumen, arena, dan aktor independen.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini banyak menemukan kekurangan baik karena keterbatasan kapabilitas penulis, maupun kendala-kendala non teknis. Untuk lebih mengoptimalkan kinerja *World Food Programme* (WFP) dalam menjalankan tugasnya, juga untuk Pemerintah, peneliti memaparkan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Untuk lebih mengoptimalkan kinerja WFP dalam melaksanakan tugasnya melalui program *Food For Assets* diharapkan program tersebut dijalankan dalam jangka panjang, di semua sektor, dan di semua wilayah yang mengalami rawan pangan.
2. Program *Food For Assets* diharapkan diberikan kepada semua wilayah yang mengalami rawan pangan, karena keberhasilan program *Food For Assets* tidak bisa menjadi acuan bahwa kerawanan pangan di Nusa Tenggara Barat berkurang, karena hanya dijalankan di kecamatan-kecamatan di Lombok.
3. Untuk Pemerintah diharapkan memperbaiki akses jalan dan infrastuktur di Nusa Tenggara Barat yang masih sulit dijangkau, karena hal tersebut bukan hanya mempersulit masyarakat untuk mengakses pangan, namun juga mempersulit sampainya bantuan pangan seperti yang diberikan oleh *World Food Programme*. Maka kendala dalam upaya mengurangi potensi rawan pangan bisa diatasi di semua sektor dan wilayah.